

## MODEL PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT POLA MANDIRI DI DESA BACU-BACU KABUPATEN BARRU

### Development Model of Public Plant Forests of Autonomous Pattern at Bacu-Bacu Village, Barru Regency

Emban Ibnurusyd Mas'ud, Supratman dan Daud Malamassam

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan  
E- mail : emban4forest@gmail.com

#### ABSTRACT

The research aimed at developing management model of the management unit of Business License of the Utility of the Wood Forest Product of the Public Plant Forests of the autonomous pattern. The research was conducted at Bacu-Bacu Village, Barru Regency from January to August 2011. Data were collected through an observation, an interview, a documentation study, and FGD. Biophysical homogeneity analysis, homogeneity analysis of plant types, and bare land value analysis were carried out to achieve the research objective. The research produces the management model of Business License of the Utility of the Wood Forest Product of the Public Plant Forests, i.e. the area as wide as 15 ha is arranged to become 15 management forest beds, and each forest bed is divided into four sub-forest beds with the same size i.e. 0.25 ha. The model silviculture prescription is to integrate the plant types of sengon (*Paraserianthes falcataria* L. Nelson), jabon (*Anthocephalus macrophyllus*), acacia (*Acacia mangium*), and mahogany (*Swietenia mahagoni*) with the peanut plant (*Arachis hypogaeae*) in a management unit, in which each plant type is managed in the sub forest beds. The model uses the multiple rotation system. The bare land value of the model is as much as Rp.1,718,330,252.64 for the management in 60 years.

Key words : Public plant forests, autonomous pattern, multiple rotation, bare land value

#### PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah memberikan konsep dasar pengelolaan hutan di Indonesia. Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi warga negara Indonesia secara umum dan masyarakat sekitar hutan secara khusus. Keuntungan yang dimaksud dapat diwujudkan melalui pengelolaan hutan secara optimal sesuai dengan fungsi masing-masing. Sehubungan dengan itu, hutan ditata menurut fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Melalui penataan tersebut penentuan pola pengelolaan hutan yang tepat dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi hutan yang lestari dan bermanfaat secara optimum bagi masyarakat, langsung ataupun tidak langsung.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non kehutanan. Selain itu kehidupan masyarakat desa sekitar hutan tidak bisa dipisahkan dengan hutan sebagai tempat menggantungkan hidupnya. Paradigma baru pembangunan pengelolaan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan.

Hutan produksi penting dikelola secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Hutan tanaman rakyat merupakan salah satu alternatif skim pengelolaan hutan di hutan produksi dan diharapkan

mampu mengoptimalkan fungsi kawasan hutan negara terutama fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Implementasi hutan tanaman rakyat dibekali oleh beberapa faktor pendukung seperti kebijakan pendukung dalam hal ini Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri kehutanan nomor 5 Tahun 2008.

Kementerian Kehutanan telah memulai program HTR di beberapa daerah termasuk Sulawesi Selatan. Areal pencadangan HTR di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2010 tercatat seluas 34.062 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten. Hingga saat ini areal yang telah dicanangkan belum mampu terimplementasi dengan baik di lapangan sehingga tujuan dari pengelolaan HTR belum tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa ada beberapa kendala terkait implementasi program Hutan Tanaman Rakyat di Sulawesi Selatan. Kendala-kendala tersebut mulai dari kesepahaman bersama mengenai pentingnya HTR dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, belum adanya inisiatif Pemerintah Kabupaten memberikan porsi anggaran pada pembangunan hutan tanaman rakyat, mekanisme yang birokratis, hingga kurangnya komunikasi antara Kementerian Kehutanan dengan Pemerintah Kabupaten. Permasalahan tersebut di atas disebabkan oleh belum adanya model pengelolaan di tingkat tapak yang mengatur fungsi stakeholder terkait (Alif, dkk, 2010).

Model pengelolaan HTR di tingkat tapak sangat perlu dilakukan sebagai upaya dalam memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder agar pengelolaan dapat berjalan secara optimal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan melestarikan kawasan hutan. Pemodelan tersebut dapat dilaksanakan di salah satu Kabupaten yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan. Model yang diharapkan dapat merancang sebuah konsep pengelolaan unit manajemen hutan di tingkat tapak yang terintegrasi dengan industri.

Pengelolaan HTR dikenal ada 3 pola yakni pola mandiri, kemitraan dan developer. Model HTR yang terintegrasi dengan industri sebaiknya diarahkan kepada arah pengelolaan pola mandiri. Pola mandiri menjadi pilihan yang baik karena pola mandiri

memungkinkan masyarakat untuk merencanakan pola tanam/sistem produksi mereka sesuai pengalaman mereka masing-masing tanpa ada intervensi dari mitra. Selain itu prosedur pembangunan HTR pola mandiri lebih sederhana dibandingkan dengan pola kemitraan dan pola developer, sehingga biaya administrasi pembangunan HTR dengan pola mandiri dapat lebih murah.

Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang potensial untuk membuat model pembangunan HTR pola mandiri. Hal tersebut disebabkan Kabupaten Barru hingga saat ini memiliki progres administrasi yang lebih baik dibandingkan beberapa Kabupaten lainnya. Luas areal HTR Kabupaten Barru yang telah diverifikasi oleh BP2HP adalah 258 ha yang terdiri atas 258 ha oleh Kelompok Tani Hutan Semangat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu dan 270 ha oleh Kelompok Tani Padang Pobbo di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting. Model pengelolaan HTR ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai model preskripsi unit-unit manajemen pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu. Melalui hal tersebut, maka penulis menganggap penting untuk melakukan sebuah penelitian mengenai model pembangunan HTR pola mandiri di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dan Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Universitas Hasanuddin. Penelitian ini membuat model pembangunan hutantanaman rakyat pola mandiri pada areal seluas 270 ha.

Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung bulan April 2011 hingga bulan Juli 2011. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan 5 tahap yaitu, (1) Penelitian Pendahuluan (2) Pengambilan data sekunder, (3) Melakukan Desain Awal, (4) Melakukan Pengambilan Data Lapangan dan Evaluasi Desain Awal, (5) Pemodelan dan Rekomendasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi pada areal Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan wawancara langsung dengan petani hutan pemegang IUPHHK-HTR, dinas

kehutanan kabupaten Barru, dinas pertanian dan perkebunan kabupaten Barru serta industri kayu.

Data sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, literatur buku, data-data dari instansi terkait, dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder yang dibutuhkan adalah kondisi umum wilayah IUPHHK-HTR meliputi : sejarah kawasan, kondisi biofisik kawasan, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Data sekunder lainnya berupa informasi dan data lainnya yang mendukung kegiatan penelitian serta bahan pustaka yang dijadikan bahan referensi landasan teori.

Penelitian ini mengambil data populasi di lapangan sebagai berikut :

1. Kawasan pengelolaan hutan tanaman rakyat seluas 270 ha di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru
2. Masyarakat pengelola hutan tanaman rakyat yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu di kawasan pengelolaan hutan tanaman rakyat seluas 270 ha yang terdiri dari 18 kepala keluarga.
3. Industri pengolah kayu yang berada di sekitar kawasan pengelolaan hutan tanaman rakyat
4. Dinas kehutanan Kabupaten Barru serta dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Barru.

Metode analisis yang digunakan untuk membuat model pembangunan hutan tanaman rakyat pola mandiri di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis Unit Manajemen IUPHHK.  
Analisis ini dilakukan di Laboratorium untuk menentukan tingkat homogenitas areal dan industri Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (KT-HTR) Padang Pobbo seluas 270 ha. Analisis yang dilakukan mencakup kondisi biofisik areal.
2. Membangun preskripsi pengelolaan unit manajemen KT-HTR Padang Pobbo yang mencakup : jenis tanaman, komposisi tanaman, pola tanam, rotasi dan perlakuan-perlakuan silvikultur.
  - a. Prediksi hasil untuk satu jangka waktu Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yaitu selama 60 tahun.
  - b. Melakukan analisis finansial model pembangunan hutan tanaman rakyat. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis Bare Land Value (BLV). BLV dapat diformulasikan :

$$\frac{\sum_{j=0}^t (I_j - C_j)(1+i)^{t-j}}{(1+i)^t - 1}$$

Keterangan :

BLV<sub>t</sub> : Bare Land Value

I<sub>j</sub> : Penerimaan pada tahun ke-j

C<sub>j</sub> : Pengeluaran pada tahun ke-j

I : Tingkat suku bunga

T : umur rotasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Unit Manajemen IUPHHK-HTR

Manajemen IUPHHK-HTR dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (KT-HTR) Padang Pobbo. Lokasi IUPHHK-HTR yang dikelola berada dalam satu hamparan yang sama. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dan analisis Sistem Informasi Geografis yang dilaksanakan pada Laboratorium Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan Universitas Hasanuddin (2011), areal IUPHHK-HTR memiliki luas 270 hektar. Areal tersebut terdiri dari 18 hak kelola kepala keluarga (IUPHHK-HTR) dengan luas pengelolaan yang sama untuk setiap keluarga yaitu 15 ha. Secara administratif, seluruh areal tersebut berada di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam membangun model preskripsi, maka terlebih dahulu disusun tabel homogenitas unit manajemen IUPHHK-HTR, yang meliputi homogenitas biofisik dan homogenitas jenis tanaman yang diinginkan oleh masyarakat dan memiliki pasar.

#### a. Homogenitas Biofisik

Variabel-variabel pembentuk homogenitas biofisik unit manajemen IUPHHK-HTR adalah, penutupan lahan, jenis tanah, jenis batuan, curah hujan, dan kelerengan lahan. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan areal IUPHHK-HTR di lokasi penelitian memiliki tingkat homogenitas biofisik yang tinggi. Homogenitas biofisik yang tinggi menjelaskan bahwa dalam satu areal IUPHHK-HTR seluas 270 ha mempunyai kondisi biofisik relatif seragam. Areal tersebut memiliki kondisi biofisik yang sama kecuali pada kelas kelerengan lahan yakni didominasi oleh kelas kelerengan 8-15% dengan persentase 86,35%, dan hal tersebut berarti kelerengan lahan masih dikategorikan seragam.

#### b. Homogenitas Jenis Tanaman

Variabel-variabel pembentuk homogenitas jenis tanaman adalah, kesesuaian lahan, keinginan masyarakat, kebutuhan industri dan persepsi pemerintah. Hasil wawancara dengan masyarakat, Dinas Kehutanan, dan industri pengolah hasil hutan kayu di sekitar lokasi penelitian diketahui jenis-jenis tanaman yang berpotensi untuk dikembangkan di lokasi penelitian.

Berdasarkan pengalaman masyarakat dan pejabat pemerintahan setempat, mereka biasa membudidayakan tanaman-tanaman sengon, kacang tanah, padi, mahoni jabon dan akasia. Berdasarkan identifikasi tanaman-tanaman tersebut hingga saat ini masih tumbuh dan dikembangkan di lokasi pengembangan program masing-masing dan memiliki tingkat pertumbuhan tanaman yang baik.

Data homogenitas biofisik pada lokasi penelitian yaitu jenis tanah ustropepts, kelerengan lahan antara 0% hingga 15 %, curah hujan 3000- 3500 mm/tahun, dan jenis batuan andesit dan basalt, maka jenis-jenis yang dipersepsikan oleh stakeholder dan disajikan pada paragraf sebelumnya layak untuk dikembangkan di lokasi penelitian.

Homogenitas biofisik dan homogenitas tanaman merupakan faktor penting dalam menentukan pola manajemen suatu tanaman. Untuk membangun sebuah pola manajemen yang optimal maka diperlukan pemilihan jenis dan penataan areal pengelolaan hutan.

Pengelolaan areal IUPHHK-HTR berdasarkan permintaan masyarakat sebaiknya melaksanakan sistem agroforestry. Sistem agroforestry yang akan dilaksanakan adalah sebuah sistem pengelolaan tanaman kehutanan dengan rotasi ganda (multiple rotation) dan diintegrasikan dengan tanaman pertanian. Pemilihan sistem ini merupakan alternatif terbaik agar masyarakat dapat menerima penerimaan jangka pendek dan jangka panjang. Pemilihan ini juga dilakukan untuk mengkolaborasikan keinginan setiap stakeholder terkait pengelolaan HTR.

Pemilihan tanaman dilakukan berdasarkan prioritas masyarakat dan dibatasi menjadi empat jenis tanaman kehutanan dengan satu jenis tanaman pertanian. Pembatasan dilakukan untuk mempermudah penataan dan pengelolaan areal IUPHHK-HTR.

Jenis tanaman kehutanan yang akan dikembangkan adalah tanaman sengon (*Paraserianthes falcataria* L. Nelson), mahoni

(*Swietenia mahagoni*), akasia (*Acacia mangium*) dan jabon (*anthocephalus macrophyllus*). Jenis tanaman pertanian yang akan dikembangkan adalah tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaeae*). Jenis-jenis tersebut dipilih berdasarkan urutan ranking teratas. Pengelolaan jenis-jenis yang telah dipilih membutuhkan sebuah sistem pengelolaan di atas lahan yang telah tertata dengan baik. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan, mengoptimalkan pendapatan tanaman, dan mempermudah prediksi hasil pengelolaan hutan.

#### Pengorganisasian Areal IUPHHK-HTR

Pengorganisasian areal yang dimaksudkan adalah membagi unit manajemen IUPHHK-HTR menjadi unit-unit pengelolaan rumah tangga petani, petak-petak dan sub petak pengelolaan.

##### a. Unit Pengelolaan Rumah Tangga IUPHHK-HTR

IUPHHK-HTR Padang Pobo memiliki luas 270 hektar. Izin tersebut dikelola oleh satu kelompok tani hutan yang bernama Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat (KT-HTR) Padang Pobo. KT-HTR Padang Pobo memiliki 18 orang anggota kelompok. Seluruh anggota kelompok tersebut berdasarkan verifikasi identitas pada tanggal 11 Juli 2009 Nomor 028/DB/VII/2009 diberikan IUPHHK-HTR untuk mengelola areal dengan luas masing-masing 15 hektar.

##### b. Petak pengelolaan IUPHHK-HTR

Untuk mengoptimalkan areal IUPHHK-HTR maka dilakukan penataan areal lebih lanjut. Setelah pembagian blok dilaksanakan untuk setiap unit rumah tangga IUPHHK-HTR maka pembagian petak pada setiap blok pengelolaan IUPHHK-HTR perlu dilakukan. Agar berjalan secara optimal dan berkelanjutan maka tiap blok pengelolaan akan ditata menjadi 13,5 hektar untuk kegiatan pengelolaan tanaman dan 1,5 hektar untuk lokasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah lokasi base camp, pembibitan, dan tempat penumpukan kayu.

Pengelolaan tanaman pada petak areal IUPHHK-HTR dilakukan dengan pola agroforestry melalui sistem rotasi ganda (multiple rotation) agar dapat dikelola secara efisien dan berkelanjutan. Pengelolaan tanaman akan dikelola secara berpindah dari petak satu ke petak lainnya oleh masyarakat setiap tahun. Pada setiap petak akan dibagi menjadi sub petak pengelolaan tanaman kehutanan. Pada sub

petak inilah akan dilaksanakan penanaman empat jenis tanaman kehutanan yaitu sub petak sengon, sub petak mahoni, sub petak akasia dan sub petak jabon yang diintegrasikan dengan tanaman kacang tanah

c. Sub Petak pengelolaan IUPHHK-HTR

Sub petak merupakan penataan areal di dalam petak pengelolaan IUPHHK-HTR. Penataan lahan menjadi sub petak dilakukan untuk menentukan luas lahan pada setiap jenis tanaman. Setiap petak IUPHHK-HTR memiliki luas 1 hektar, di dalam lahan seluas 1 hektar tersebut akan dikembangkan empat jenis tanaman kehutanan. Oleh karena itu, petak akan dibagi menjadi 4 sub petak dengan luas masing-masing 0,25 hektar. Untuk mengoptimisasi lahan maka terdapat dua petak yang hanya memiliki satu sub petak yakni pada petak N dan petak O yang masing-masing ditanami tanaman mahoni

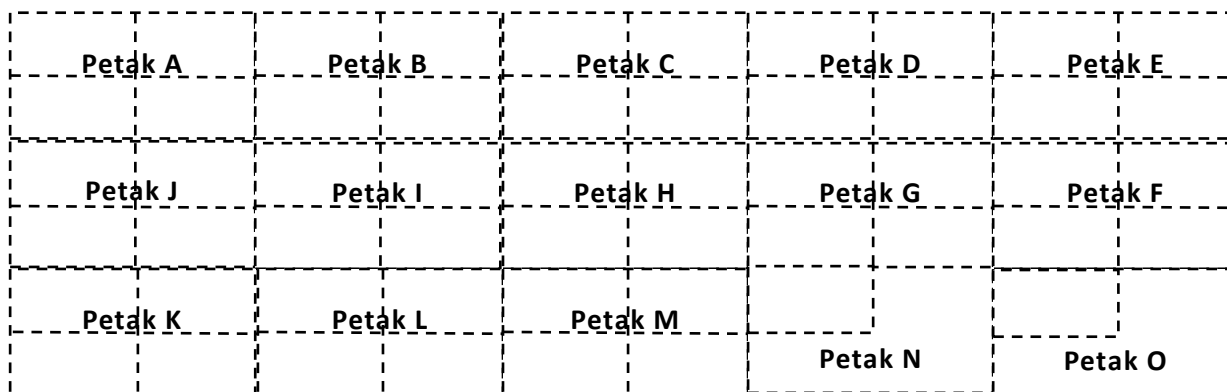
### Preskripsi Silvikultur

Pengelolaan areal IUPHHK-HTR akan dibangun oleh komposisi tegakan untuk kayu pertukangan. Kayu pertukangan yang dimaksud adalah kayu yang akan diolah sesuai dengan tujuan pengelolaan industri terdekat yakni UD. Jati Indah dan UD. Cahaya Galung. Berdasarkan penelitian terhadap kedua industri tersebut maka didapatkan informasi bahwa masa panen tanaman sengon di daerah tersebut untuk diolah adalah 5 tahun dengan asumsi setiap pohon akan menghasilkan 1 - 1,5 meter kubik kayu olahan, tanaman jabon dapat dipanen pada umur 6 tahun dengan asumsi setiap pohon menghasilkan 1,5 - 1,7 meter kubik kayu olahan, tanaman akasia dengan umur 8 tahun dapat menghasilkan kayu olahan sebesar 1,5 - 2 meter kubik kayu dan untuk jenis tanaman mahoni masa panennya adalah 15 tahun dengan asumsi kayu lahan yang dapat diterima adalah sebesar

2 - 2,5 meter kubik. Asumsi-asumsi produksi tersebut didapatkan berdasarkan produksi rata-rata kedua industri tersebut untuk masing-masing jenis tanaman.

Pengelolaan areal IUPHHK-HTR dimulai dengan kegiatan penanaman. Penanaman akan dilakukan setiap tahun pada setiap 1 hektar petak yang terdiri dari sub petak sengon 0,25 hektar, sub petak mahoni 0,25 hektar, sub petak akasia 0,25 hektar, dan sub petak jabon 0,25 hektar. Penanaman areal IUPHHK-HTR dimulai dari tahun pertama hingga tahun ke-13. Penanaman dilaksanakan secara berturut-turut dari petak 1a pada tahun pertama, petak 1b pada tahun kedua, petak 1c pada tahun ketiga hingga pada tahun ke-13 di petak 1m. Untuk kegiatan pemanenan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tanaman akan berbeda-beda. Walaupun memiliki tujuan yang sama untuk kayu pertukangan, masing-masing jenis tanaman memiliki waktu masak tebang yang berbeda-beda. Tanaman sengon, jabon dan akasia termasuk jenis *fast growing species* dan berturut-turut memiliki rotasi selama 5, 6, dan 8 tahun. Hal berbeda ditunjukkan mahoni yang merupakan *long growth species* dan memiliki rotasi 15 tahun.

Sub petak masing-masing jenis akan ditanam dengan jarak tanam 5 x 5 meter. Jumlah tanaman untuk masing-masing sub petak adalah 100 tanaman, jadi untuk lahan satu hektar akan dikelola tanaman sebanyak 400 tanaman kehutanan (khusus petak N dan petak O hanya terdiri dari 100 tanaman mahoni). Di sela tanaman kehutanan tersebut akan dikelola pula tanaman kacang tanah di antara tanaman kehutanan dengan jarak 20 x 20 cm. Tanaman kacang tanah akan mengikuti kegiatan pengelolaan tanaman kehutanan dalam satu hektar lahan selama satu tahun.



Gambar 1. Pola pemanfaatan lahan dalam satu

**Keterangan:**

1. Masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman tanaman kehutanan pada masing-masing petak seluas 0,25 hektar pada petak A pada tahun pertama, petak B pada tahun kedua dan seterusnya.
2. Penambahan penanaman tahun pertama yaitu sengon pada petak F&K, jabon pada petak G&M, dan mahoni petak N&O.
3. Masyarakat melaksanakan kegiatan pemanenan pada akhir tahun ke-5 pada petak A,F,&K untuk sub petak sengon, akhir tahun ke-6 pada petak B untuk sub petak sengon, dan seterusnya.
4. Masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman bekas areal tebangan pemanenan pada awal tahun ke-6 pada petak A,F&K untuk sub petak sengon, awal tahun ke-7 pada petak B untuk sub petak sengon, dan seterusnya
5. Masyarakat melaksanakan kegiatan pemanenan pada akhir tahun ke-6 pada petak A,G&M untuk sub petak jabon, akhir tahun ke-7 pada petak B untuk sub petak jabon, dan seterusnya.
6. Masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman bekas areal tebangan pemanenan pada awal tahun ke-7 pada petak A,G&M untuk sub petak jabon, awal tahun ke-8 pada petak B untuk sub petak jabon, dan seterusnya.
7. Masyarakat melaksanakan kegiatan pemanenan pada akhir tahun ke-8 pada petak A&I untuk sub petak akasia, akhir tahun ke-9 pada petak B untuk sub petak akasia, dan seterusnya.
8. Masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman bekas areal tebangan pemanenan pada awal tahun ke-9 pada petak A&I untuk sub petak akasia,

awal tahun ke-10 pada petak B untuk sub petak akasia, dan seterusnya.

9. Masyarakat melaksanakan kegiatan pemanenan pada akhir tahun ke-15 pada petak A,N&O untuk sub petak mahoni, akhir tahun ke-16 pada petak B untuk sub petak mahoni, dan seterusnya.
10. Masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman bekas areal tebangan pemanenan pada awal tahun ke-16 pada petak A,N&O untuk sub petak mahoni, awal tahun ke-17 pada petak B untuk sub petak mahoni, dan seterusnya.

IUPHHK-HTR

**Analisis Bare Land Value**

Analisis BLV dilakukan untuk mendapatkan nilai lahan IUPHHK-HTR apabila dilaksanakan model preskripsi pengelolaan unit usaha IUPHHK-HTR pola mandiri seperti yang telah dibahas pada uraian sebelumnya. Analisis BLV dilakukan untuk mendapatkan nilai lahan pada masing-masing petak pengelolaan.

Nilai Bare Land Value merupakan nilai BLV pada setiap sub petak tanaman sengon, jabon, akasia dan mahoni yang diintegrasikan dengan tanaman kacang tanah. Nilai BLV pada penelitian ini menjelaskan bahwa pada setiap satu IUPHHK-HTR yang terdiri dari 15 petak lahan seluas 13,5 hektar yang dikelola melalui penataan areal sub petak sengon, sub petak jabon, sub petak akasia, dan sub petak mahoni yang terintegrasi dengan budidaya kacang tanah selama 60 tahun adalah Rp.1.718.330.252,64.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa dengan pemanfaatan lahan melalui model yang telah dibuat akan memberikan kontribusi nyata terhadap nilai lahan pada daerah Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru. Apabila nilai tersebut di atas dibandingkan dengan nilai jual rata-rata lahan kebun di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru adalah Rp.30.000.000 per hektar dan nilai jual rata-rata lahan sawah di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru adalah Rp.40.000.000 per hektar, maka terdapat peningkatan signifikan nilai lahan melalui model pengelolaan HTR pola mandiri di Desa Bacu-Bacu kabupaten Barru menjadi Rp 114.555.350 per hektar.

### KESIMPULAN

Model yang tepat dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat Padang Pabbo adalah pembangunan HTR pola mandiri dengan sistem rotasi ganda (multiple rotation) yang mengkolaborasi

tanaman sengon, jabon, akasia, mahoni dan kacang tanah. Hasil penelitian menginformasikan bahwa pembangunan HTR dengan sistem tersebut pada lahan 15 hektar yang dimiliki oleh satu kepala keluarga pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu mampu menghasilkan nilai lahan Rp. 1.718.330.252,64.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alif, dkk. 2010. **Studi Implementasi Program Hutan Tanaman Rakyat di Sulawesi Selatan**. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Clutter, Jerome L, dkk. 1983. **Timber Management : A Quantitative Approach**. Canada : John Wiley & Sons.
- Warner, Katherine. 1995. **Selecting Tree Species on the Basis of Community Needs**. Food and Agriculture Organization of the United Nations.